

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Hubungan tersebut akan menimbulkan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*).

(Agus sartono,2015). Satu hal penting dalam manajemen keuangan, bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang di terjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan yang disebut *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Masalah agensi dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (*agent*) dan manajemen perusahaan (*principal*) dalam mengelola laba. Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014).

#### 2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

*Signalling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (*principal*) dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka

melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Hal yang dapat terjadi atas asimetri informasi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Simarmata dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja.

2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Dengan adanya *signaling theory* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah *go public* pasti memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya di masa depan. Dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Dalam *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Selain itu, bagi pihak manajemen praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan. Karena pada dasarnya nilai

perusahaan dapat dikatakan baik salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu.

### 1.3 Devinisi Umum

#### 1.3.1 *Tax Avoidance*

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) diuraikan oleh Suandy (2011:21) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Sari dan Kurniasih, 2013:61). Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat, apabila perusahaan melakukan tindakan dengan satu tujuan tunggal yakni untuk menghindari pajak, maka hal tersebut dianggap tidak membayar “nilai wajar” pajak kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Dalam penelitian ini (Wijayanti, 2016) CETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. CETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak penghasilan dalam (Lanis & Richardson, 2011). Adapun rumus menghitung CETR sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Keterangan:

CETR : adalah *Cash Effective Tax Rates* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan.

*Cash tax paid i-t* : adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

*Pretax income i-t* : adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

### ***1.3.2 Corporate Social Responsibility***

Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Kartini, 2013:18). Kontribusi dan konstruksi dari pelaksanaan *Corporate social Responsibility* (CSR) perusahaan berbanding lurus dengan tujuan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat. Kesinergian perusahaan dan pemerintah menjadi energi yang besar untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan (Kartini, 2013:93) *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Gunawan, 2015). Pelaksanaan CSR merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Pelaporan aktivitas CSR perusahaan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja perusahaan serta dianggap sebagai praktik akuntabilitas perusahaan (Gunawan, 2012). Salah satu alasan perusahaan memerlukan pengungkapan kinerja sosial yaitu pengungkapan CSR akan bermanfaat bagi perusahaan dalam peningkatan keuntungan di masa depan (Peloza, 2011). Aktivitas CSR dapat dilaporkan dalam dua jenis laporan yaitu menjadi bagian laporan tahunan atau

terpisah dari laporan tahunan, Gunawan: Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* yaitu dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan terdiri dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk kinerja perusahaan dan pengembangan keberlanjutan produk perusahaan. Pedoman standar pelaporan aktivitas CSR pada laporan keberlanjutan dikembangkan oleh the Global Reporting Initiative (GRI) yang telah diterapkan di seluruh negara. Mulai Mei 2013, standar pelaporan CSR dalam laporan keberlanjutan yang dipakai adalah GRI versi 4. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu CSR akan diukur dengan menggunakan *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)* yang berdasarkan GRI-4. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sebanyak 149 item. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada check list dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI<sub>j</sub> : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j

$\sum X_{ij}$  : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

N<sub>j</sub> : jumlah item untuk perusahaan j,  $n_j \leq 149$

### 1.3.3 Karakter Eksekutif

Dalam *Agency Theory*, pimpinan perusahaan (agent) cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk memaksimalkan keuntungan meskipun ada resiko didalamnya. Dalam hal ini apabila agent

diberikan otoritas lebih untuk mengelola dana perusahaan, maka pimpinan perusahaan akan berusaha untuk mengelola dana demi memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu usaha yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Low (2009) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan per-usahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Untuk mengukur resiko per-usahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan. Rumus deviasi standar tersebut adalah sebagai berikut:

$$RISK = \sqrt{\sum_{T-1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E)^2 / (T-1)}$$

Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset dari perusahaan.

#### **1.3.4 Sales Growth**

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan mengalisa besarnya *sales growth* (pertumbuhan penjualan). *Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban

pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian ini didukung oleh penelitian (Budiman J. & Setiyono, 2012) yang membuktikan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales Growth* dalam penelitian ini dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun i dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. Adapun rumus perhitungan *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan akhir periode } t - \text{Penjualan akhir periode } t-1}{\text{Penjualan akhir periode } t-1}$$

Hal ini sesuai dengan penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) dan (Swingly & Sukartha, 2015).

### 2.3.5 Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan melalui penggunaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba (*income minimation*) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Manajemen laba diproksi berdasarkan rasio akrual modal kerja dengan penjualan.

$$\text{Manajemen laba (ML)} = \frac{\text{Akrual Modal kerja (t)}}{\text{Penjualan periode (t)}}$$

$$\text{Akrual modal kerja} = \Delta \text{AL} - \Delta \text{HL} - \Delta \text{Kas}$$

Keterangan:

- AL = Perubahan aktiva lancar pada periode t
- HL = Perubahan hutang lancar pada periode t

□  $Kas =$  Perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode t

Data akrual modal kerja dapat diperoleh langsung dari laporan arus kas aktivitas operasi, sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa melakukan perhitungan yang rumit.

### 2.3.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Reviani (2012) ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Beberapa proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan adalah jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin banyak jumlah karyawan berarti semakin banyak hasil yang diproduksi. Semakin besar aset berarti semakin banyak modal yang ditanam, semakin tinggi jumlah penjualan berarti semakin banyak perputaran uang, dan semakin tinggi kapitalisasi pasar maka perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat. Dalam menghitung ukuran perusahaan digunakan rumus sebagai berikut :

$$Size = \ln(\text{Total Asset})$$



## 2.4 Peneliti Terdahulu

JUDUL / author	VARIABEL	METODE	HASIL
<p>PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.</p> <p>Nurul Hidayati, Fidiana . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017</p>	<p>Y : Tax Avoidance</p> <p>X1 : CSR</p> <p>X2: Komisaris Independen</p> <p>X3 : komite audit</p> <p>X4 : kualitas audit</p>	<p>1. tax avoidance di ukur dengan menggunakan</p> $\text{Current ETR} = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Total Laba Sebelum Pajak}}$ <p>2. CSRDI</p> $\text{CSRDI} = \frac{\sum X_{yt}}{ni}$ <p>CSRDI : Corporate Social Responsibility Disclosure Index</p> <p><math>\sum X_{yi}</math> : Nilai 1 = jika item y diungkapkan, Nilai 0 = jika item y tidak diungkapkan</p> <p>n : jumlah item untuk perusahaan i, <math>ni \leq 78</math></p> <p>3. Komisaris independen di ukur dengan menggunakan rumus berikut :</p> $\text{KOMIND} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$ <p>4. kualitas audit diukur melalui kinerja auditor yang tergolong dalam KAP Big Four.</p>	<p>H1: maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dicerminkan oleh indeks pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR memang merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Pajak.</p> <p>Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>H3 : Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>H4 : Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak</p>

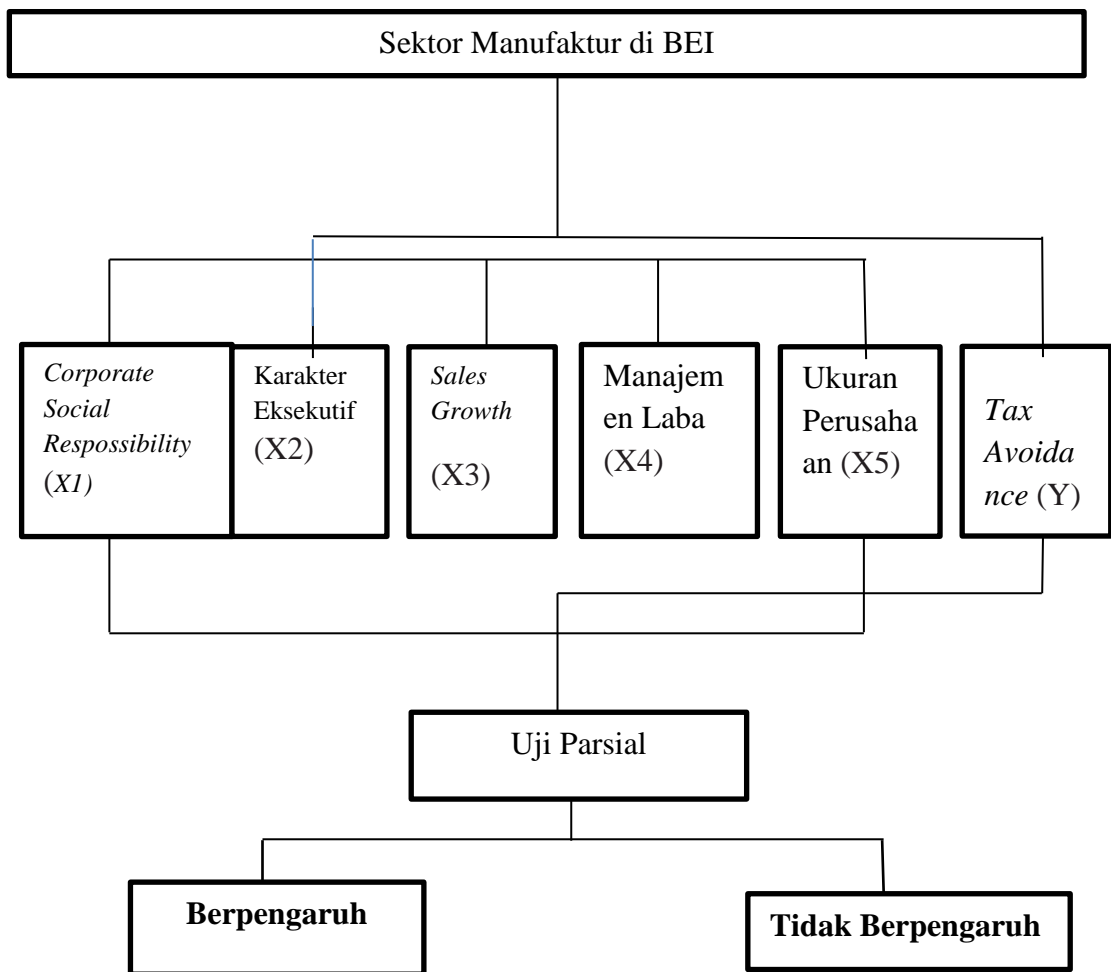
<p>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI .</p> <p>Vivi Adeyani Tandean , Piter Nainggolan . Jurnal Akuntansi Bisnis Vol. 9 No. 2</p>	<p>Y : tax avoidance</p> <p>X1 : Karakter Eksekutif</p> <p>X2: Ukuran Perusahaan</p> <p>X3 : profitabilitas</p>	<p>1. tax avoidance menggunakan proksi current ETR dengan membagi current tax expense dengan pre-tax income.</p> <p>2. untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (corporate risk) /EBITDA</p> $RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E)^2}{(T-1)}}$ <p>Keterangan : E = EBITDA (earning before interest, tax and depreciation assets) / Total Asset T = Total Sampel</p> <p>3. profitabilitas diukur dengan rasio return on asset (ROA) yang didapatkan dari : ROA = earning after tax (EAT) / dengan total assets.</p>	<p>Ha1: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.</p> <p>Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.</p> <p>Ha3: Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.</p>
<p>PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN SALES GROWTH PADA TAX AVOIDANCE.</p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015)</p>	<p>Y : Tax avoidance</p> <p>X1 : Karakter Eksekutif</p> <p>X2 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X3 : Leverage</p> <p>X4 : Sales Growth</p>	<p>1. Tax avoidance diukur dengan proxy Cash Effective Tax Rate (CETR).</p> <p>2. Corporate risk digunakan untuk mengetahui karakter eksekutif suatu perusahaan. Komite audit (audit committee) diukur dengan menghitung jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan.</p> <p>3. Ukuran perusahaan (size) diukur dengan proxy logaritma natural total aset</p> <p>4. serta sales growth dihitung dengan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal</p>	<p>H1 : analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik risiko perusahaan yang merupakan proxy dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada tax avoidance.</p> <p>H2 : analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik total aset yang merupakan proxy dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance.</p> <p>H3 : Sedangkan untuk pengujian variabel</p>

		periode dan dibagi penjualan awal periode.	<i>leverage</i> , hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . H4 : an hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2010-2015. NURUL HIDAYAH. PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017	Y : tax avoidance X1 : corporate governance X2: corporate social responsibility	1.Tax avoidance Perhitungan ETR menggunakan model dari Lanis dan Richardson $ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$ 2.CSRI/ CSDI $CSRIj = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$ Keterangan: CSRIj : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j $\sum X_{ij}$ : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan. Nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 149.	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengungkapan corporate social responsibility, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Sedangkan komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

<p>PENGARUH LEVERAGE, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK,</p> <p>Ridwan Pajriyansyah Amrie Firmansyah Politeknik Keuangan Negara STAN Indonesia  <a href="mailto:amrie@pknstan.ac.id">amrie@pknstan.ac.id</a></p>	<p>Y : Tax avoidanc e  X1 : pengaruh  X2 : kompens asi rugi fiskal  X3 :manaje men laba</p>	<p>1.Modified Effective Tax Rate (ETR) (variabel dependen)</p> $TaxAvoid_{it} = \frac{\sum_{t-2}^t (PTEBX \times \tau)_{it} - \sum_{t-2}^t CTP_{it}}{\sum_{t-2}^t PTEBX_{it}}$ <p>Dimana:  PTEBX : pre-tax earnings before exceptional items (Laba Bersih Sebelum Pajak)  t : home-country statutory corporate income tax rate (Tarif Pajak yang berlaku)  CTP : current taxes paid (Pajak yang dibayarkan tahun berjalan)  i : Perusahaan  t : Tahun</p> <p>2. Leverage diukur ( variabel Independen) dengan total debt to asset ratio</p> $Rasio\ hutang = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$ <p>3. mengukur manajemen laba dengan menggunakan nilai total akrual regresi persamaan TACC :  TACC<sub>it</sub> = (EBE<sub>lit</sub> + TTE<sub>it</sub>) - [(CFO<sub>it</sub> + ITP<sub>it</sub>) - EIDO<sub>it</sub>]</p> <p>4. Variabel Kontrol Return on Asset (ROA)</p> $ROA = \frac{Laba\ Bersih\ Stlh\ Pajak}{Total\ Aset} \times$ <p>5. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan total aset  SIZE = Ln(Total Asset)</p>	<p>H1: leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak  H2: kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.  H3 :manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
--	---	---	--

## 2.5 Kerangka Pikir

Upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimisasi beban pajak dapat dilakukan melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Kategori penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen pajak yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Mengutip dalam Santoso dan Ning (2013; 5), pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika tindakan penghindaran pajak tersebut sudah melanggar atau melebihi batasan-batasan ketentuan perpajakan yang kemudian hal tersebut tergolong kedalam penggelapan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.6 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiono (2016), hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berfikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah :

### 1. *Corporate social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance*

Perusahaan akan menerapkan CSR sepanjang mereka dapat bermanfaat secara ekonomis dari pelaksanaan perilaku yang bertanggung jawab tersebut, seperti menciptakan suatu merek yang akan meningkatkan pemasaran, dan bagaimana dapat meningkatkan laba dalam jangka panjang (Mardikanto, 2014). Pada penelitian yang didukung oleh (Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun, 2016) menyebutkan bahwa CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H1: diduga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 2. Karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*

Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu Budiman (2012) menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara karakter eksekutif dengan penghindaran pajak.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H2: di duga Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. *Sales growth* terhadap *tax avoidance*

*Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H3 : di duga *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Manajemen Laba terhadap *tax avoidance*

Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan melalui penggunaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba (*income minimation*) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Berdasarkan keterangan yang diuraikan maka, Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H4 : di duga Manejemen Laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan ukuran perusahaan kecil. Besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding



perusahaan yang berukuran kecil. Hal ini cenderung akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H5: di duga Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.